

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- a. Pada **Oktober** 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,56% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,81.

Fluktuasi harga komoditas: Kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan daging ayam dapat terus mempengaruhi inflasi.

Kondisi ekonomi global: Perubahan dalam ekonomi global, termasuk harga energi dan bahan baku, dapat berdampak pada inflasi domestik.

Kebijakan pemerintah: Kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi juga akan berpengaruh.

- b. Pada **November** 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Dharmasraya sebesar 1,29% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,19...

Risiko ke depan terkait inflasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan pemerintah, dan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Kenaikan harga bahan bakar dan biaya transportasi juga dapat berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi di masa depan. Oleh karena itu, pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa sangat penting untuk mengantisipasi risiko inflasi yang mungkin terjadi.

- c. Pada **Desember** 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,49% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,51.

Risiko

Risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan inflasi di masa depan termasuk fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi dan pajak, serta faktor cuaca yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Kenaikan harga bahan baku dan biaya transportasi juga dapat berkontribusi terhadap inflasi yang lebih tinggi di masa mendatang .

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Oktober** Inflasi didorong oleh kenaikan pada 10 dari 11 indeks kelompok pengeluaran. Dengan kenaikan terbesar pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,00%, kelompok sandang dan alas kaki sebesar 2,67%, dan kelompok makanan dan minuman jadi/restoran sebesar 2,77%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi tertinggi secara tahunan antara lain beras, bawang merah, minyak goreng, emas perhiasan , rokok kretek, dan gula pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain jengkol, cabai merah dan bensin. Laju deflasi mont-to-mont dan year-to-date pada bulan Oktober 2024 masing-masing sebesar 0,18% dan

0,17%, mengindikasikan adanya tekanan deflasi. Laju deflasi month-to-month (m-to-m) dan year-to-date (y-to-d) pada bulan Oktober 2024 masing-masing sebesar 0,18% dan 0,17%, mengindikasikan adanya tekanan deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi tahunan terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,69%), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,30%), serta kelompok makanan jadi dan minuman/restoran (0,25%).

2. **November** Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Dharmasraya pada November 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,29% secara tahunan. Inflasi didorong oleh kenaikan harga pada 11 kelompok pengeluaran, yaitu makanan, sandang, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Laju inflasi bulanan sebesar 0,36% dan laju inflasi tahunan berjalan sebesar 0,19%. Komoditas unggulan menyumbang inflasi tahunan antara lain beras, bawang merah minyak goreng, emas perhiasan, dan berbagai jenis rokok. Komoditas yang menyumbang deflasi secara bulanan antara lain kentang, cabai, dan sayur-sayuran.
3. **Desember** Permasalahan utama dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Dharmasraya adalah tekanan inflasi yang terus-menerus, sifat kenaikan harga yang meluas pada berbagai kelompok pengeluaran, serta komoditas dan subkelompok tertentu yang menjadi pemicu inflasi. Laju inflasi month-to-month (m-to-m) dan inflasi year-to-date (y-to-d) pada bulan Desember 2024 masing-masing sebesar 0,30% dan 0,49%, mengindikasikan tekanan inflasi yang berkelanjutan. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi tertinggi secara tahunan antara lain minyak goreng, beras, emas perhiasan, aneka rokok, kopi, daging ayam, ketupat/lontong sayur, mobil, dan biaya sekolah. Sedangkan komoditi yang memberikan sumbangan inflasi tertinggi secara bulanan antara lain minyak goreng, cabai rawit, telur ayam, serta aneka sayur dan buah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ Oktober

Pengawasan Harga: Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap harga barang kebutuhan pokok, terutama yang mengalami fluktuasi signifikan. Ini termasuk melakukan inspeksi pasar untuk memastikan harga tetap dalam batas wajar.

Stabilisasi Pasokan: Untuk menghindari kelangkaan barang, pemerintah berupaya memastikan pasokan barang kebutuhan pokok tetap stabil. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan distributor dan produsen lokal untuk menjaga ketersediaan barang di pasar.

Program Subsidi: Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah dapat memberikan subsidi untuk barang-barang tertentu, seperti bahan pangan, untuk membantu menurunkan harga dan meringankan beban masyarakat.

Edukasi dan Sosialisasi: Masyarakat diberikan informasi mengenai cara mengelola keuangan dan konsumsi yang bijak, serta pentingnya berbelanja secara cerdas untuk menghindari pembelian yang tidak perlu.

Kerjasama dengan Pihak Terkait: Pemerintah daerah seringkali bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan, untuk mendapatkan data yang akurat mengenai inflasi dan harga barang, serta untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Peningkatan Produksi Lokal: Mendorong pertanian dan industri lokal untuk meningkatkan produksi barang kebutuhan pokok, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah yang dapat berfluktuasi.

◦ **November**

Pemantauan Harga: Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melakukan pemantauan terhadap perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan harga barang kebutuhan pokok. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tinggi dan mengambil tindakan yang diperlukan .

Intervensi Pasar: Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pasar dengan mengatur pasokan barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Ini bisa dilakukan melalui operasi pasar atau kerjasama dengan distributor untuk memastikan ketersediaan barang dan menghindari lonjakan harga .

Program Subsidi: Untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi, pemerintah dapat memberikan subsidi pada barang-barang kebutuhan pokok tertentu. Ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kemiskinan akibat kenaikan harga .

Edukasi dan Sosialisasi: Masyarakat perlu diberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan dan cara menghadapi inflasi. Edukasi tentang pentingnya diversifikasi konsumsi dan penggunaan barang lokal juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada barang impor yang harganya lebih fluktuatif.

Kerjasama dengan Pihak Terkait: Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk produsen, distributor, dan lembaga keuangan, untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dalam distribusi barang dan pengendalian harga.

Monitoring dan Evaluasi: Kebijakan yang diterapkan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya dalam mengendalikan inflasi. Jika diperlukan, kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut

◦ **Desember**

Pengawasan Harga dan Stabilisasi Pasokan: Pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap harga barang kebutuhan pokok secara berkala. Ini termasuk melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan memastikan pasokan barang yang cukup, terutama saat terjadi lonjakan permintaan .

Kerjasama dengan Petani dan Produsen: Membangun kemitraan dengan petani dan produsen lokal untuk meningkatkan produksi barang kebutuhan pokok. Program ini dapat mencakup pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan akses ke teknologi pertanian yang lebih baik untuk meningkatkan hasil pertanian .

Peningkatan Infrastruktur Distribusi: Memperbaiki infrastruktur transportasi dan distribusi untuk memastikan barang kebutuhan pokok dapat sampai ke konsumen dengan cepat dan efisien. Hal ini dapat mengurangi biaya distribusi dan mencegah lonjakan harga akibat keterlambatan pasokan .

Edukasi Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan

keuangan dan cara menghadapi inflasi. Masyarakat yang lebih teredukasi dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran rumah tangga mereka dan mengurangi dampak inflasi .

Diversifikasi Sumber Pangan: Mendorong diversifikasi sumber pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Ini dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mengurangi risiko inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas tertentu .

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk mengukur efektivitasnya dalam mengendalikan inflasi. Penyesuaian kebijakan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan efektif .

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ Oktober

Efektivitas Pengawasan Harga: Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat apakah pengawasan harga yang dilakukan oleh pemerintah daerah berhasil menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Jika harga barang tetap stabil atau mengalami penurunan, maka kebijakan ini dapat dianggap efektif. Namun, jika harga terus meningkat, perlu ditinjau kembali metode pengawasan yang diterapkan.

Stabilitas Pasokan: Keberhasilan dalam menjaga pasokan barang kebutuhan pokok juga merupakan indikator penting. Jika pasokan barang tetap terjaga dan tidak ada kelangkaan yang signifikan, maka kebijakan stabilisasi pasokan dapat dianggap berhasil. Sebaliknya, jika terjadi kelangkaan yang berulang, maka perlu ada perbaikan dalam strategi pengadaan dan distribusi.

Dampak Subsidi: Evaluasi terhadap program subsidi perlu dilakukan untuk melihat apakah subsidi yang diberikan efektif dalam menurunkan harga barang dan membantu masyarakat. Ini dapat diukur dengan melihat perubahan harga barang yang disubsidi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Tingkat Inflasi: Mengamati tren inflasi dari waktu ke waktu adalah cara langsung untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian inflasi. Jika inflasi menunjukkan penurunan atau stabilitas setelah penerapan kebijakan, maka kebijakan tersebut dapat dianggap berhasil. Namun, jika inflasi tetap tinggi atau meningkat, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya.

Respon Masyarakat: Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan juga penting. Jika masyarakat merasa terbantu dan puas dengan kebijakan yang ada, ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diterima dengan baik. Sebaliknya, jika ada keluhan atau ketidakpuasan, maka perlu ada penyesuaian.

Analisis Data dan Informasi: Penggunaan data yang akurat dan terkini dalam pengambilan keputusan sangat penting. Evaluasi harus mencakup analisis apakah data yang digunakan untuk merumuskan kebijakan sudah memadai dan relevan.

◦ November

Efektivitas Kebijakan: Evaluasi perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan berhasil menurunkan atau mengendalikan tingkat inflasi. Misalnya, jika inflasi y-on-y pada November 2024 tercatat sebesar 1,29 persen, perlu dianalisis apakah kebijakan yang diimplementasikan mampu menstabilkan harga barang dan jasa, terutama pada kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tinggi seperti makanan dan perawatan pribadi ,

Dampak Sosial: Kebijakan pengendalian inflasi harus dievaluasi dari segi dampaknya terhadap masyarakat. Apakah kebijakan tersebut berhasil menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan? Misalnya, jika subsidi pada barang kebutuhan pokok diterapkan, perlu dilihat apakah masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

Respons terhadap Perubahan Ekonomi: Kebijakan harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas global atau perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil pertanian. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang ada dapat dengan cepat disesuaikan dengan kondisi yang berubah.

Monitoring dan Data: Penting untuk memiliki sistem pemantauan yang baik untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai harga barang dan inflasi. Evaluasi harus mencakup analisis data yang dikumpulkan untuk menentukan tren inflasi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Rekomendasi untuk Perbaikan: Berdasarkan hasil evaluasi, perlu ada rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Jika ada kebijakan yang tidak efektif, perlu dipertimbangkan untuk diubah atau diganti dengan pendekatan yang lebih baik.

◦ Desember

Analisis Data Inflasi: Mengkaji data inflasi yang ada, seperti tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) dan month-to-month (m-to-m). Misalnya, pada Desember 2024, inflasi y-on-y tercatat sebesar 0,49%, yang menunjukkan adanya kenaikan harga yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan efektivitas kebijakan yang diterapkan .

Dampak terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok: Menilai apakah kebijakan yang diterapkan berhasil menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Ini termasuk memantau perubahan harga di pasar dan membandingkannya dengan periode sebelumnya. Jika harga barang kebutuhan pokok tetap tinggi meskipun ada kebijakan, maka perlu dilakukan penyesuaian .

Partisipasi Masyarakat: Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program yang diluncurkan untuk mengendalikan inflasi, seperti operasi pasar atau program edukasi. Tingkat partisipasi yang rendah dapat menunjukkan kurangnya sosialisasi atau ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada .

Ketersediaan dan Aksesibilitas Barang: Mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan berhasil meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok. Jika masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang dengan harga yang wajar, maka kebijakan perlu ditinjau kembali .

Efektivitas Kerjasama dengan Petani dan Produsen: Menilai hasil dari kerjasama yang

dibangun dengan petani dan produsen lokal. Apakah ada peningkatan produksi dan penurunan harga akibat kerjasama ini? Jika tidak, perlu dievaluasi kembali strategi yang digunakan .

Feedback dari Masyarakat: Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan. Survei atau forum diskusi dapat digunakan untuk mendapatkan masukan tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam kebijakan pengendalian inflasi .

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ Oktober

Diversifikasi Sumber Pasokan: Mendorong diversifikasi sumber pasokan barang kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama dengan petani lokal dan produsen dari daerah lain. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan dan mengurangi risiko kelangkaan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan meningkatkan kapasitas produksi lokal, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada barang impor dan menstabilkan harga.

Penerapan Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi informasi untuk memantau harga dan pasokan barang secara real-time. Aplikasi atau platform digital dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi harga yang akurat dan terkini, sehingga mereka dapat berbelanja dengan lebih cerdas.

Edukasi Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan konsumsi yang bijak. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya berbelanja secara cerdas dan menghindari pembelian yang tidak perlu, terutama saat harga sedang tinggi.

Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan melakukan evaluasi rutin, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat.

◦ November

Peningkatan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok: Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan melakukan kerjasama yang lebih erat dengan produsen dan distributor. Operasi pasar yang rutin dapat dilakukan untuk menstabilkan harga dan mencegah kelangkaan barang.

Penguatan Program Subsidi: Memperluas program subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, seperti beras, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Subsidi ini harus tepat sasaran untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak inflasi.

Edukasi Masyarakat: Melakukan program edukasi kepada masyarakat mengenai

pengelolaan keuangan dan cara menghadapi inflasi. Masyarakat perlu diberikan informasi tentang pentingnya perencanaan belanja dan penggunaan barang lokal untuk mengurangi dampak inflasi.

Monitoring dan Analisis Data: Membangun sistem pemantauan harga yang lebih baik untuk mengumpulkan data yang akurat dan terkini mengenai inflasi dan harga barang. Data ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam kebijakan pengendalian inflasi.

Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur transportasi dan logistik untuk memperlancar distribusi barang. Infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya transportasi dan, pada gilirannya, menurunkan harga barang di pasar.

Fleksibilitas Kebijakan: Kebijakan pengendalian inflasi harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah. Pemerintah perlu siap untuk mengubah strategi jika diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data.

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Mengingat inflasi juga terjadi di sektor kesehatan dan pendidikan, penting untuk meningkatkan kualitas layanan di kedua sektor ini agar masyarakat tidak terbebani oleh biaya yang meningkat.

◦ Desember

Peningkatan Produksi Pertanian: Mendorong program peningkatan produksi pertanian lokal melalui pelatihan dan penyediaan akses terhadap teknologi pertanian modern. Hal ini dapat membantu menstabilkan harga pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah .

Penguatan Infrastruktur Distribusi: Investasi dalam infrastruktur transportasi dan distribusi untuk memastikan barang kebutuhan pokok dapat sampai ke konsumen dengan cepat dan efisien. Peningkatan infrastruktur dapat mengurangi biaya distribusi dan, pada gilirannya, menurunkan harga .

Operasi Pasar dan Stabilitas Harga: Melakukan operasi pasar secara berkala untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pedagang dan produsen untuk menyediakan barang dengan harga terjangkau di pasar .

Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat: Mengadakan program edukasi untuk masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan cara menghadapi inflasi. Masyarakat yang teredukasi akan lebih siap dalam menghadapi perubahan harga dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pengeluaran mereka .

Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan. Data inflasi dan harga barang harus dianalisis secara rutin untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan .

Diversifikasi Sumber Pangan: Mendorong diversifikasi sumber pangan dengan memperkenalkan komoditas baru yang dapat ditanam di daerah tersebut. Diversifikasi dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis komoditas dan meningkatkan ketahanan pangan .

Pengembangan Program Jaminan Sosial: Menerapkan program jaminan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu mereka menghadapi dampak inflasi. Program ini dapat berupa bantuan langsung tunai atau subsidi untuk kebutuhan pokok .

Peningkatan Kualitas Data dan Informasi: Memperbaiki sistem pengumpulan data dan informasi terkait harga dan inflasi. Data yang akurat dan terkini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam kebijakan pengendalian inflasi .

Fasilitasi Akses Pembiayaan: Meningkatkan akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha kecil untuk mendukung produksi dan distribusi. Program kredit mikro atau bantuan modal dapat membantu mereka dalam meningkatkan kapasitas produksi